

BAB 2

LATAR BELAKANG KONFLIK RUSIA-UKRAINA

Setiap konflik yang terjadi dalam hubungan internasional memiliki latar belakangnya tersendiri. Latar belakang memiliki peran penting dan tidak dapat diabaikan dalam membahas suatu konflik yang ada. Latar belakang bisa berupa sejarah atau urutan-urutan peristiwa yang terjadi pada suatu pihak, letak suatu pihak tersebut berada, maupun nilai dan norma yang dianut oleh mereka.

Bab ini akan menjelaskan latar belakang dan kronologi krisis Ukraina. Tujuan dari penjelasan ini adalah pertama, untuk mengetahui lebih jelas tentang identitas yang dimiliki oleh Ukraina dan Rusia. Kedua, untuk mengetahui sejarah hubungan antara Ukraina dengan Rusia baik secara umum maupun secara khusus. Ketiga, untuk mengetahui lebih jelas situasi yang terjadi selama krisis Ukraina berlangsung. Terakhir, untuk mengetahui jenis kejahatan kemanusiaan maupun perang yang terjadi di Ukraina beserta dampak kemanusiaan yang ditimbulkan hingga sekarang.

2.1 Awal dari Krisis Ukraina

Konflik antara Ukraina dengan Rusia bukanlah hal yang baru saja terjadi. Pada awalnya Rusia, Ukraina dan Belarus adalah sebuah kesatuan wilayah dengan pusatnya yang sekarang ini adalah ibukota Ukraina yaitu Kiev. Kemudian wilayah tersebut berkembang setelah penguasa dari Kiev mengadakan perjanjian perdagangan dan pertambangan dengan Konstantinopel, dan wilayah tersebut

dinamakan Kyivan Rus pada abad 10. Karena perjanjian itu pula, Kyivan Rus mulai menerapkan basis Kristen Ortodoks dan menolak Katolik Roma yang dibawa oleh orang-orang dari wilayah tetangganya, Polandia. Konflik mulai terjadi setelah penguasa Kyivan Rus bernama Yaroslav The Wise wafat dan pecahnya wilayah Kyivan Rus berupa berdirinya pemerintahan-pemerintahan kecil berdasar agama, ras maupun bahasa. Hal itu diperparah oleh serangan dari Kekaisaran Mongol pada tahun 1237 hingga 1240, menyebabkan terpecahnya wilayah Kyivan Rus. Terpecahnya itu pula dimanfaatkan oleh kerajaan-kerajaan di Lithuania dan Polandia untuk menyebarkan agama Katolik Roma, sebelum akhirnya Kekaisaran Rusia yang berpindah pusat kekuasaan di Moskow dapat mengambil kembali wilayah-wilayah lama Kyivan Rus pada tahun 1782 (Hamm, 1996, pp. 3-9). Namun semenjak itu, terlihat perbedaan pada masyarakat Ukraina yang tinggal di wilayah timur maupun barat. Masyarakat di timur Ukraina mayoritas berbahasa Rusia dan menganut agama Kristen Ortodoks, sementara masyarakat di barat Ukraina mayoritas berbahasa Ukraina dan menganut agama Katolik (Conant, 2014).

Konflik yang dialami di Ukraina pernah pula terjadi pada tahun 1917 setelah Kekaisaran Rusia runtuh dan berganti menjadi Uni Soviet. Ukraina yang saat itu bernama Republik Nasional Ukraina mendeklarasikan perang terhadap pemerintahan baru yang dikendalikan oleh Bolshevik dengan tujuan agar Ukraina dapat menjadi negara independen. Perang berakhir pada tahun 1921, dengan hasil kekalahan telak di pihak Ukraina (Zhukovsky, 1993, p. 464). Selanjutnya sebagian besar dari wilayah Ukraina seperti Krimea, Kuban dan lainnya menjadi milik Uni

Soviet, sementara bagian barat dari Ukraina yang menjadi milik Polandia (Hupchick, 1995).

Perbedaan yang mencolok serta konflik-konflik yang telah terjadi di antara Ukraina dan Rusia pula mengubah identitas yang awalnya dimiliki bersama oleh kedua pihak. Rusia menganggap identitasnya adalah sebuah negara yang berprinsipkan *Odin Narod*, atau dalam bahasa Rusia berarti “Satu Bangsa” dimana wilayah-wilayah dan bangsa-bangsa yang dahulunya merupakan kesatuan dari Kyivan Rus (Ukraina dan Belarusia) adalah bagian dari Rusia yang diharapkan dapat kembali bersatu (Kuzio, 2016, p. 3). Sementara itu Ukraina menganggap identitasnya sebagai sebuah negara independen yang memiliki budaya dan bahasanya sendiri serta memiliki keterikatan dengan Eropa ketimbang dengan Rusia (Kappeler, 2014, pp. 112-114).

Krimea sebagai salah satu dari bagian utama dari konflik Ukraina-Rusia pun memiliki sejarahnya sendiri. Setelah penyerangan Kekaisaran Mongol pada tahun 1240, Krimea dikuasai oleh Mongol sebelum dua abad kemudian diserahkan kepada Turki akibat perang antara Kekaisaran Mongol dengan Ottoman, dan Krimea kembali menjadi milik Kekaisaran Rusia pada tahun 1783 (Subtelny, 1988, p. 173). Ketika Kekaisaran Rusia runtuh dan berganti menjadi Uni Soviet serta berlangsungnya Perang Dunia 2, Krimea termasuk salah satu wilayah yang mengalami gejolak paling keras dikarenakan perbedaan mencolok antara penduduk Rusia yang mendukung Uni Soviet dengan penduduk keturunan Mongol (Tatar) yang mendukung Ukraina dan Jerman pada saat itu (Hall, 2014, p. 52). Yang menyebabkan penduduk Tatar mendapat hukuman pemindahan paksa menuju

Siberia pada masa pemerintahan Joseph Stalin setelah Krimea berhasil dikuasai kembali oleh Uni Soviet (Subtelny, 1988, p. 483). Pada masa pemerintahan Nikita Krushchev, Krimea diserahkan kepada Ukraina dalam rangka mempererat hubungan antar rakyat Ukraina dan Uni Soviet (Goldberg, 1992, p. 2). Krimea pun menjadi bagian dari Ukraina, dan tetap bertahan walaupun Uni Soviet runtuh pada tahun 1991.

Krisis Ukraina diawali pada November 2013 ketika Ukraina mengalami masalah ekonomi berupa hutang negara sebesar US\$ 140 milyar (Gardner, 2016, p. 68). Presiden Ukraina Viktor Yanukovych dihadapkan dua pilihan pada saat itu, yakni menerima bantuan pinjaman dari Uni Eropa sebesar US\$ 827 milyar dengan syarat bersedia bergabung sebagai anggota Uni Eropa (SPIEGEL Staff, 2013), atau menerima bantuan pinjaman dari Rusia sebesar US\$ 15 milyar serta diberi keringanan harga gas bumi yang awalnya US\$ 400 menjadi US\$ 268 per seribu meter kubiknya (The Economist, 2013). Selama memutuskan di antara dua pilihan sebelumnya, terjadi penangguhan perjanjian untuk bergabung dengan Uni Eropa sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 21 November, 29 November dan 15 Desember. Akhirnya pada tanggal 17 Desember, Yanukovych dan presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan rapat bersama dalam rangka bantuan pinjaman yang ditawarkan Rusia sebelumnya, yang disusul dengan penerimaan resmi pinjaman tersebut pada tanggal 24 Desember (Mdzinarshvili, 2014).

Selama bulan November hingga Desember 2013 itu pula, protes besar-besaran dari kelompok kepentingan dan masyarakat yang berposisi dengan pemerintah sudah bermunculan berupa berkumpulnya 800,000 demonstran di

Lapangan Kemerdekaan di Kiev (BBC Online, 2014) beserta penghancuran patung Vladimir Lenin sebagai simbol memberontak dari pemerintah (Mdzinarshvili, 8 Maret 2014). Kumpulan dari kelompok kepentingan dan masyarakat ini menamakan diri mereka sebagai blok Maidan/Euromaidan (Balmforth, 2013).

Dikarenakan semakin banyaknya orang-orang yang bergabung dengan Maidan dan berdemonstrasi agar Yanukovych turun dari jabatannya, pada tanggal 17 Januari Yanukovych menerbitkan undang-undang untuk melarang tindakan demonstrasi anti pemerintah (Department of the Verkhovna Rada of Ukraine Secretariat, 2014). Setelah diterbitkannya undang-undang ini, terjadi keributan antara Maidan dengan polisi, yang pertama kalinya demonstrasi pada tanggal 22 Januari memakan korban tewas sebanyak tiga orang. Peristiwa ini mempengaruhi rapat negosiasi antara Ukraina dengan Uni Eropa di waktu yang sama dengan berujung pada kecaman Uni Eropa atas tindakan pemerintah Ukraina beserta memanasnya hubungan antar kedua belah pihak (Mdzinarshvili, 2014).

Setelah mendapat banyak protes dari negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat ditambah Perdana Menteri Mykola Azarov mengundurkan diri dari jabatan pada tanggal 28 Januari (Balibouse, 2014), parlemen Ukraina memutuskan untuk mencabut sebagian aturan dari undang-undang anti-protes dan menawarkan amnesti untuk membujuk demonstran (Kramer, 2014). Namun hasilnya tetap sama dimana demonstran tetap menduduki Lapangan Kemerdekaan Kiev. Selama bulan Februari, telah jatuh korban tewas sebanyak 67 orang dan 77 orang ditangkap polisi dalam keributan yang terjadi (Interfax Ukraine, 2014).

Yanukovych pun melakukan negosiasi dengan pemimpin-pemimpin dari demonstran pada tanggal 21 Februari, yang berlanjut dengan menghilang pada tanggal 22 Februari tepat ketika parlemen Ukraina memutuskan untuk menurunkan jabatannya sebagai presiden dikarenakan kegagalannya menjaga stabilitas Ukraina. Perencanaan penurunan jabatan itu juga disertai dengan pemilihan presiden baru nantinya pada tanggal 25 Mei (Mdzinarshvili, 2014).

Sempat terjadi kekosongan pemerintahan hingga parlemen Ukraina mengumumkan tiga hal pada tanggal 23-26 Februari. Pertama, memunculkan nama Olexander Turchynov sebagai presiden sementara dan Arseniy Yatsenyuk sebagai perdana menteri sementara (Smelzer, et al., 2014). Kedua, kesatuan elit polisi Berkut dibubarkan dan disalahkan atas tewasnya para demonstran ketika terjadi kericuhan. Ketiga, pelarangan penggunaan bahasa Rusia sebagai bahasa kedua di Ukraina. Berita ini memicu protes dari wilayah-wilayah Ukraina yang mayoritas warganya adalah *Russophone* atau yang menggunakan bahasa Rusia dalam kehidupan sehari-harinya (BBC Online, 2014).

2.2 Aneksasi Krimea

Walaupun secara resmi militer Rusia melakukan intervensi terhadap wilayah selatan Ukraina yaitu Republik Otonomi Krimea pada tanggal 1 Maret, namun terdapat bukti bahwa Rusia sudah lama ikut andil dalam aneksasi Krimea yaitu sejak dimulainya Krisis Ukraina pada akhir bulan November. Diawali ketika media-media elektronik di Rusia mengumumkan bahwa pemerintah Rusia akan menjalankan program untuk mengatasi blok Maidan yang menarik perhatian dari

bagian selatan dan timur Ukraina, salah satunya adalah Krimea. Setelahnya pada tanggal 14 Desember, dua pemimpin kelompok pro-Rusia Gennady Basov dan Sergei Aksyonov mengadakan pertemuan dengan Konsulat Jenderal Republik Otonomi Krimea Vyacheslav Svitlychny dan menyatakan secara resmi bahwa Krimea sedang merencanakan referendum dalam rangka menentukan apakah Krimea perlu berpisah dengan Ukraina dan bergabung dengan Rusia (Wood, et al., 2015, p. xiii). Hasilnya adalah pernyataan resmi lainnya dari parlemen Krimea pada tanggal 4 Februari bahwa Krimea akan mengadakan referendum seperti yang direncanakan sebelumnya, serta membujuk Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melindungi Krimea (Novoross.info, 2014).

Sebagai tanda pemberontakan lainnya kepada pemerintahan Ukraina yang baru, pada tanggal 25 Februari ketika Walikota Sevastopol Vladimir Yatsuba mengundurkan diri dari jabatannya, jabatan walikota tersebut diganti oleh seorang warga sipil bernama Alexei Chalyi tanpa seizin Presiden Ukraina (The Guardian, 2014). Pada tanggal 27 Februari, sekelompok anggota bersenjata menguasai ibukota dari Republik Otonomi Krimea yakni Simferopol dengan mengibarkan bendera Rusia dan menduduki gedung parlementer Krimea (Gumuchian, et al., 2014). Kemudian kelompok bersenjata tersebut juga menduduki dua bandara di Simferopol pada tanggal 28 Februari (BBC Online, 2014) dan memblokade Isthmus of Perekop, dimana wilayah tersebut adalah perbatasan antara Krimea dengan Ukraina (Wood, et al., 2015, p. 2). Parlemen Ukraina menyatakan kelompok bersenjata tersebut adalah militer Rusia yang mulai menginvasi Ukraina (Ukraine Today, 2015).

Masuknya militer Rusia secara besar-besaran ke Krimea baru terjadi pada tanggal 1 Maret, ketika Parlemen Rusia pun menyetujui permintaan Putin untuk menggunakan kekuatan militer penuh di Ukraina dengan wilayah yang ditempatkan yakni Krimea (Radyuhin, 1 Maret 2014). Masuknya militer Rusia pada hari itu diakui sendiri oleh Perdana Menteri Republik Otonomi Krimea, Sergei Aksyonov, dengan pernyataan bahwa dia memang meminta bantuan militer Rusia untuk mengamankan perdamaian dan stabilitas di Krimea (Pavlishak, 2014).

Selama tanggal 2 Maret hingga 15 Maret, militer Rusia memblokir satu persatu wilayah di Krimea seperti Teluk Donuzlav, desa-desa di perbatasan Kherson Oblast (Losiev, 2015), dan semenanjung di Laut Hitam yang merupakan lokasi pangkalan militer Rusia sejak tahun 1783 (Yoon, et al., 2014, p. 3). Pemerintah Ukraina yang mendengar kabar bahwa Rusia telah mengirimkan militernya ke Krimea, segera meningkatkan penjagaan setiap perbatasan (Yoon, et al., 2014, pp. 16-17). Melalui juru bicara dari Presiden Sementara Ukraina Oleksander Turchynov, ia menyatakan bahwa keseluruhan dari aktivitas otoritas Krimea tidak disetujui oleh Ukraina baik parlemen maupun pemerintahannya karena selama ini mereka sebetulnya ditekan oleh Rusia dan ingin menindak tegas parlemen Krimea (Reuters, 2014).

Akhirnya pada tanggal 16 Maret, diadakan referendum untuk warga yang tinggal di wilayah Krimea untuk menentukan apakah Krimea ingin bergabung dengan Rusia atau tetap bersama Ukraina (Fox News, 2014). Hasil dari referendum kemudian diumumkan pada tanggal 17 Maret, dengan hasil bahwa warga Krimea memilih bergabung dengan Rusia (Konstantinov, 2014). Dari hasil referendum

tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin pun menerbitkan surat persetujuan akan bergabungnya Republik Otonomi Krimea menjadi salah satu dari bagian Federasi Rusia dengan nama Republik Krimea (**surat dapat dilihat di lampiran**).

Surat persetujuan tersebut kemudian diproses menjadi surat perjanjian penggabungan Krimea dengan Rusia (Prezident Rossii, 2014) yang ditandatangani oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Republik Krimea Sergei Aksyonov, Ketua Dewan Krimea Vladimir Konstantinov, dan Walikota Sevastopol Alexei Chalyi. Akhirnya pada tanggal 21 Maret, Krimea resmi menjadi bagian dari Federasi Rusia setelah surat perjanjian penggabungan Krimea dengan Rusia diratifikasi oleh Majelis Federal Rusia (Strange & Ensor, 2014).



Gambar II.1: Penandatanganan Perjanjian Bersatunya Wilayah Republik Krimea dan Kota Sevastopol dengan Rusia pada tanggal 18 Maret. Dari kiri ke kanan: Sergei Aksyonov, Vladimir Konstantinov, Vladimir Putin dan Alexei Chalyi.

Fotografer: Dokumentasi Resmi Pemerintah Rusia. Sumber: Prezident Rossii, 2014

Intervensi militer yang dilakukan Rusia beserta pengumuman resmi bahwa Krimea menjadi bagian dari Rusia pun ditanggapi secara beragam dari berbagai negara. Reaksi pertama adalah dari Ukraina yang tidak menerima akan lepasnya Krimea berupa pernyataan dari Perdana Menteri Sementara Ukraina Arseniy Yatsenyuk tentang Rusia yang telah merampok Krimea dimana sejatinya merupakan milik Ukraina (Smith & Eshchenko, 2014).

Kedua, PBB bereaksi melalui Sekretaris Jenderal Ban Ki Moon dengan ucapan dukacita dan kekecewaannya atas perilaku Rusia terhadap Ukraina berupa intervensi kedaulatan Ukraina dan aneksasi (UN News Centre, 2014), serta atlas negara resmi dari PBB masih menyertakan Krimea sebagai bagian dari negara Ukraina.



Gambar II.2: Peta Negara Ukraina oleh PBB

Sumber: (UN, 2014)

Ketiga, reaksi Uni Eropa melalui perwakilannya Catherine Ashton adalah mereka menyayangkan atas tindakan Rusia yang menggunakan kekuatan militer untuk menginvasi Ukraina, dan meminta Rusia untuk mematuhi peraturan internasional dan aturan yang diterapkan oleh Ukraina sendiri demi menurunkan ketegangan hubungan antara Ukraina dengan Rusia (European External Action Service, 2014). Keempat, Dewan Parlemen Eropa (PACE) juga menganggap bahwa tindakan Rusia yang terlibat dalam separatisme Krimea termasuk melanggar wilayah kedaulatan dari Ukraina dan memberikan dukungan penuh pada integritas Ukraina dan Krimea (PACE, 2014).

Terakhir, NATO bereaksi berupa mengutuk aksi Rusia dalam intervensi militer di salah satu wilayah Ukraina yang menyalahi perjanjian internasional Memorandum Budapest 1994 tentang persetujuan antara lima negara pendiri PBB (Amerika Serikat, Rusia, China, Perancis dan Inggris) untuk menghargai keamanan kedaulatan dari Ukraina, Kazakhstan dan Belarus serta Perjanjian Kerjasama 1997 antara Rusia dengan Ukraina (NATO, 2014).

Peristiwa aneksasi Krimea menyebabkan pula wilayah timur Ukraina lainnya seperti Donetsk dan Lugansk ikut melakukan separatisme dengan harapan mereka dapat pula menjadi bagian dari Rusia (BBC Online, 2014). Konflik bersenjata antara pemerintah Ukraina dengan separatis pro-Rusia masih terjadi hingga sekarang (OHCHR, 2016).

Selama aneksasi Krimea berlangsung hingga tanggal 21 Maret, negara-negara di Eropa, Amerika, Australia dan sebagian dari Asia melancarkan sanksi ekonomi dalam rangka menghukum Rusia atas tindakan intervensi militernya terhadap wilayah kedaulatan Ukraina. Sanksi terhadap Rusia berlangsung sebanyak tiga gelombang, yakni gelombang pertama berupa *travelling ban* khusus untuk anggota parlemen Republik Krimea dan anggota Dewan Federasi Rusia pada tanggal 17 Maret oleh Uni Eropa, Kanada, dan Amerika Serikat (Council of European Union, 2014, pp. 1-6) serta pembekuan aset pada 20 pebisnis Rusia yang berinvestasi di Amerika Serikat pada tanggal 20 Maret (US Department of Treasury, 2014). Sanksi gelombang kedua berupa pembekuan aset khusus 17 badan usaha yang memiliki hubungan erat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada tanggal 28 April (US Department of Treasury, 2014). Sanksi gelombang ketiga

pada tanggal 17 Juli setelah terjadinya konflik bersenjata di wilayah timur Ukraina yaitu Donetsk dan Lugansk (The Moscow Times, 2014). Dimana sanksi gelombang ketiga masih berlangsung hingga sekarang.

2.3 Dampak Kemanusiaan

Keseluruhan dari peristiwa yang terjadi di Ukraina selama krisis tersebut mengakibatkan dampak kemanusiaan yang besar untuk warga Ukraina, dimana dampak kemanusiaan yang dihasilkan berasal dari kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang yang terjadi sejak pertengahan April 2014 hingga Februari 2017 di wilayah perbatasan timur Ukraina yaitu Donetsk, Lugansk dan Kharkiv.

Hingga Februari 2017, total dari jumlah korban baik dari sipil, militer maupun kelompok bersenjata adalah 33.146 kasus berupa 9.900 korban jiwa dan 23.246 korban luka. Terdapat 1.493 korban sejak Februari 2015, di antaranya adalah warga sipil yang terjebak dalam pertempuran, tertangkap dan mengalami penyiksaan, serta mengalami kondisi kesehatan yang buruk (OHCHR, 2017, p. 12). Sementara itu jumlah pencari suaka dari Ukraina yang tercatat telah melebihi 1.600.000 orang, dimana para pencari suaka ini pergi ke Rusia (750.000), Belarus (80.000), negara Eropa lainnya (5.000), dan sisanya tetap berada di Ukraina (Semenovich, 2016). Sebagian dari pengungsi yang tetap berada di Ukraina memiliki status Internally Displaced Person (IDP), dimana orang-orang tersebut berpindah tempat tinggal namun tidak keluar dari perbatasan negara tempat mereka tinggal pada awalnya. Pemerintah negara bersangkutan memiliki tanggung jawab

untuk mengurus orang-orang dengan status IDP, tetapi cenderung tidak memperhatikan mereka sehingga orang-orang dengan status IDP menjadi lebih rentan menjadi korban.

Tetapi jumlah IDP ini belum termasuk warga sipil Ukraina lainnya yang masih dalam daftar antrian maupun yang tidak terdaftar sebagai IDP, dan diperkirakan jumlah keseluruhan dari warga sipil yang membutuhkan bantuan kemanusiaan lebih dari tiga juta orang. Pemerintah Ukraina juga mengamandemen peraturan pendaftaran IDP dimana pemerintah lokal dapat memberikan status IDP tanpa melalui Kantor Imigrasi Negara terlebih dahulu. Namun langkah ini masih belum menyelesaikan permasalahan turunnya dana bantuan kemanusiaan untuk IDP yang masih sering ditangguhkan oleh negara (OHCHR, 2016, p. 9).

Rumah sakit yang tersedia pun semakin sedikit, seiring satu persatu telah hancur karena berada di daerah zona pertempuran. Dilaporkan oleh WHO pada akhir Desember 2014, terdapat 32 rumah sakit yang terkena dampak kemanusiaan ini dimana 17 di antaranya telah ditutup sepenuhnya dan 70% dari seluruh staff medis telah melarikan diri. Kekurangan staf medis dan rumah sakit ini pula yang menyebabkan persoalan kesehatan tersendiri untuk warga Ukraina, dimana tidak hanya terjadi wabah penyakit tetapi juga mengalami gangguan kejiwaan yang tidak dapat diobati dengan benar. Data dari WHO pada September 2014 menunjukkan bahwa 40 orang telah tewas akibat kelaparan dan kurangnya perawatan kesehatan (WHO, Desember 2014). Walaupun dari WHO sendiri telah menyediakan bantuan berupa pendirian klinik darurat sejumlah empat mobil klinik keliling, jumlah pasien

yang terlampaui banyak hingga satu juta orang menyebabkan klinik itu pun hanya dapat mencapai beberapa desa maupun kota saja (Europe WHO, 2016).

Hal ini diperparah dengan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan perang yang terjadi di Ukraina sendiri. Data dari OHCHR menyatakan kelompok bersenjata milisi dari Ukraina seperti kelompok Azov kerap kali melakukan baku tembak di wilayah yang dipadati oleh warga sipil dan menangkap sebagian warga yang diduga sebagai penentang pemerintahan Ukraina. Dari Maret 2014 hingga Februari 2016, terdapat 726 kasus yang diketahui dan dicatat. Laporan itu sudah termasuk 11 kasus pembunuhan, 12 kasus penyiksaan, 27 kasus pengekangan HAM secara sepihak, 29 kasus pengeroyokan, dan 6 kasus pencurian (OHCHR, 2016a, p. 15).

Terdapat lima tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok bersenjata militer maupun pemerintah Ukraina sendiri yang tercatat sejak 2014 hingga 2016. Pertama adalah kebebasan berekspresi dimana selama bulan Oktober 2014, banyak jurnalis dari berbagai negara ditangkap kelompok bersenjata dan diinterogasi. Semua jurnalis ditemukan selamat namun mengalami trauma karena dipaksa memberi berita palsu mengenai keadaan sekitar Lugansk (OHCHR, 2014, pp. 13-14).

Kedua, pemerintah Ukraina menyadap sambungan kontak 30.000 orang setiap harinya selama tahun 2016 untuk menangkap warga yang menentang pemerintahan Ukraina, dimana diutamakan yang tinggal di Donetsk dan Lugansk. Ketika sudah ditentukan nama dan lokasi, kelompok milisi menangkap satu persatu

dan disiksa bahkan memasang daftar pencarian via internet bila target tidak ditemukan (OCHCR, 2016, p. 26).

Ketiga adalah pelanggaran terhadap kebebasan agama, dimana agama minoritas di Donetsk dan Lugansk seperti Kristen Protestan (OCHCR, November 2014, p. 17), Islam, Yahudi dan Jehovah mengalami diskriminasi dimana setiap jemaat yang hendak melakukan ibadah atau perayaan agama harus diinspeksi kelompok milisi untuk memastikan bahwa tidak ada unsur hendak merencanakan penentangan terhadap pemerintahan Ukraina, tetapi tetap ada kemungkinan kegiatan ibadah masing-masing agama minoritas tetap dilarang meski jemaat telah menunjukkan dokumen dan bukti yang lengkap (OCHCR, Mei 2016, p. 27).

Keempat adalah ketika pemerintah Ukraina dan pemerintah lokal di Kharkiv melarang masyarakat mengadakan demonstrasi damai mengatasnamakan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk pada tahun 2014, dimana berakhir ricuh antara anti-Maidan dengan pro-Maidan dan robohnya patung Lenin di Kharkiv. Demo yang sama terjadi pula di Donetsk maupun Lugansk, dengan berakhir ricuh dan tiga orang terkena luka tembak (OCHCR, 2014, p. 16). Peraturan ini masih berlaku hingga laporan terakhir pada Oktober 2016 (OHCHR, 2016). Terakhir, kelompok milisi ini juga kerap kali menanam ranjau di wilayah padat pemukiman warga sipil dan wilayah agrikultur, dimana menyebabkan sekitar 109 kasus ledakan ranjau dengan korban berupa anak-anak pada Maret 2015 (UNICEF, 2015).

Dikarenakan mendapat banyak pengungsi yang berencana untuk mencari suaka di Rusia, pemerintah Rusia pun memberikan bantuan luar negeri terhadap

Ukraina berupa menampung sejumlah pengungsi di kota-kota yang masih berbatasan dengan perbatasan Ukraina seperti Belgorod dan Perm. Para pengungsi yang ditempatkan di Belgorod diberikan fasilitas mewah berupa makanan, konsultasi kesehatan dan jiwa, serta tempat pengungsian yang layak (Malinkin & Nigmatullina, 2015). Selain itu di kota Perm, pemerintah Rusia juga memberikan uang saku terhadap para pengungsi di sana sebesar 800 Rubel atau setara dengan USD 20 untuk kebutuhan hidup para pengungsi (Astrakhova, 2014). Selain itu pada Agustus 2014, Rusia pertama kalinya mengirimkan lebih dari 5.000 ton bantuan kemanusiaan berupa makanan, obat-obatan, generator listrik, pakaian dan air bersih di wilayah tenggara Ukraina (Donetsk, Lugansk dan Kharkiv). Hal ini masih berlanjut selama dua tahun, dengan total mendekati angka 60.000 ton bantuan kemanusiaan pada Maret 2016 (Semenovich, 2016).

Di sisi lain pemerintah Ukraina yang menganggap semua bantuan negara lain maupun Rusia adalah penyamaran untuk menyerang Ukraina dari dalam, kemudian pemerintah Ukraina mengeluarkan kebijakan untuk memblokir setiap bantuan. Walaupun isi dari bantuan hanyalah makanan dan obat-obatan, tetapi tetap ditolak sehingga semakin mempersulit kondisi warga yang menjadi korban perang karena telatnya bantuan yang dikirimkan (Amnesty International, 2014).

2.4 Kesimpulan

Setelah membahas mengenai sejarah umum hubungan antara Ukraina dengan Rusia hingga bagaimana krisis yang terjadi menyebabkan dampak kemanusiaan yang besar terhadap warga sipil, dapat ditarik beberapa kesimpulan.

Pertama, hubungan antara Ukraina dengan Rusia telah lama mengalami konflik ditandai dengan terpecahnya kesatuan budaya Kyivan Rus dan berlanjut hingga krisis Ukraina yang masih berlangsung hingga sekarang. Penyebab utama dari konflik juga dikarenakan perbedaan prinsip nasional dan identitas masing-masing negara, menyebabkan hubungan negatif antara dua negara tidak akan pernah berakhir. Hal ini pula dapat menjelaskan mengapa Ukraina bersikeras bergabung dengan Uni Eropa berdasarkan identitas yang dimiliki Ukraina sebagai negara independen yang memiliki keterkaitan sejarah dengan Eropa, sementara Rusia menginginkan Ukraina menjauhi ranah Eropa hingga militer Rusia melakukan aneksasi Krimea sebagai salah satu tindakannya berdasarkan identitas yang dimiliki Rusia sebagai negara berprinsip *Odin Narod*.

Kedua, awal dari krisis Ukraina berasal dari banyaknya protes dari masyarakat, kelompok maupun parlemen yang beroposisi dengan kebijakan presiden Ukraina Yanukovich sehingga terjadi kosongnya jabatan presiden yang kemudian digantikan sementara oleh Turchynov hingga pemilu presiden berikutnya. Beberapa wilayah timur Ukraina seperti Krimea, Donetsk, Lugansk dan Kharkiv melakukan upaya separatisme agar dapat bergabung dengan Rusia, namun hanya Krimea saja yang berhasil melakukan referendum dan menjadi bagian dari Rusia. Ketiga wilayah lainnya berakhir menjadi tempat terjadinya konflik bersenjata antara milisi Ukraina dengan kelompok separatis pro-Rusia yang terjadi hingga sekarang. Sementara itu Rusia mengalami tiga gelombang sanksi ekonomi internasional terhadap masuknya militer Rusia di Krimea tanpa seijin Ukraina, yang dihitung sebagai melakukan aneksasi.

Ketiga, kejahatan kemanusiaan di Donetsk, Lugansk dan Kharkiv yang paling banyak terjadi adalah ketika kelompok bersenjata milisi di bawah pemerintah Ukraina melibatkan warga sipil berupa menangkap, memberi ancaman, pengekangan HAM terhadap warga sipil bahkan membunuh. Warga sipil yang berada di daerah konflik merupakan non-kombatan yang seharusnya tidak terlibat dalam perang. Tidak hanya itu, pemerintah Ukraina juga menghalangi setiap bantuan luar negeri dengan landasan curiga terhadap serangan terselubung oleh Rusia. Hal ini menyebabkan sebagian warga sipil yang berada di wilayah konflik mencari suaka ke negara lain terutama Rusia yang menawarkan perlindungan, dan sebagian yang lainnya telah sepenuhnya terjebak dalam wilayah konflik menjadi korban perang hingga saat ini.